

**KOORDINASI SERIKAT PEREMPUAN INDONESIA (SERUNI)
DENGAN ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN, LAW AND
DEVELOPMENT (APWLD) DALAM ISU HAK BURUH
PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2018**

Oleh : Nadia Zahra Rahmadhani

Email : nadia.zahra1924@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.Ip, M.Int R

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research will discuss about the results of Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)'s coordinated campaigns with its Indonesian transnational advocacy network, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI). The case studied is the implementation of APWLD's programs about women's labour rights, Breaking Out of Marginalization (BOOM) and Labour & Migration (L&M), in Indonesia in 2017-2018.

This research is a qualitative research that reviews an event based on social patterns, interactions between communities, and its social influences. The data collection methods are interviews and document analysis. The perspective used in analyzing the topic is constructivism with Keck and Sikkink's Transnational Advocacy Network (TAN) theory. The level analysis used is the group level.

This research shows that SERUNI has reclaimed land rights in Kandis and Pangalengan as the results of BOOM program they took a part in. However, SERUNI and APWLD have also struggled in reaching their goals due to the problems they were facing. SERUNI's problems are caused by limited funds and their antagonistic relations with the government and companies.

Keywords: SERUNI, APWLD, women workers, women's labour rights, Transnational Advocacy Network (TAN).

PENDAHULUAN

Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) merupakan salah satu organisasi masyarakat lokal yang meletakkan fokus pada advokasi isu perempuan dan anak dari semua kelas dan sektor. SERUNI telah aktif melaksanakan kampanye dan advokasi dalam berbagai isu, termasuk keadilan lingkungan; akses perempuan ke layanan; kekerasan berbasis gender; kesejahteraan buruh, migran, dan petani dengan perspektif perempuan; pengusutan paksa; representasi perempuan dalam sektor publik; maupun isu sosial dan politik demokratis nasional yang terjadi.¹ SERUNI menyatakan tidak hanya melaksanakan kampanye di daerah perkotaan yang diasumsikan stabil secara finansial, namun juga di daerah pedesaan dimana adat feodal-patriarkis masih terjadi dan merugikan perempuan.²

SERUNI merupakan salah satu mitra aktif APWLD yang selalu terlibat dalam berbagai agendanya. SERUNI merupakan anggota *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) 2012-2014, dan mentor FPAR 2015-2017. Dalam hal memperjuangkan hak buruh sendiri, SERUNI berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Kritik SERUNI terhadap kebijakan ini adalah bagaimana upah minimum tidak ditetapkan, namun didasarkan dengan inflasi yang terjadi. Advokasi yang dilakukan SERUNI ditunjukkan dari bagaimana SERUNI berperan sebagai sekolah untuk mendorong gerakan perempuan, sehingga perempuan tidak bersikap pasif dan dapat memperjuangkan haknya.³

SERUNI menyatakan perjuangan perempuan harus selaras dengan perjuangan kelas buruh dan kaum tani. Perekonomian Indonesia dianggap dimonopoli perusahaan asing, sehingga kebijakan yang

diciptakan pemerintah cenderung tidak berpihak pada kaum buruh dan tani, dan bersifat 'setengah feodal.'⁴ Pada tahun 2017, SERUNI mengadakan kongres pertamanya, "Membangun Organisasi Perempuan Demokratis Untuk Memajukan Perjuangan Perempuan dan Rakyat Indonesia" yang membahas mengenai hak perempuan, termasuk petani dan buruh dengan perspektif perempuan.⁵ Sepanjang tahun 2017 dan 2018, SERUNI bekerja sama dengan organisasi lokal seperti Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), serta organisasi lain di bawah jaringan advokasi transnasional APWLD, Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI).⁶

APWLD dibentuk pada 1986 di Nairobi, Kenya, yang didasari oleh pertanyaan berkelanjutan mengenai kemampuan perempuan dalam mobilisasi ekonomi, politik, dan sosial.⁷ APWLD beranggotakan 265 anggota dari 30 negara di Asia Pasifik. APWLD berperan dalam isu ketenagakerjaan, pernikahan, perubahan iklim, ketanggapan atas bencana, hak atas tanah, serta penguatan koalisi masyarakat sipil dengan perspektif perempuan, diikuti oleh persoalan yang mencakup aspek lokal dengan program dan kampanye yang dilaksanakan.⁸ APWLD menjalankan fungsinya sebagai *umbrella group*. Jaringan APWLD lainnya terkait hak buruh perempuan tersebar di berbagai negara di Asia Pasifik, di antaranya Penn Thozhilalargal Sangam (*Women Workers Union*) dari India, Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia

¹ APWLD, FDJ Brief Indonesia – Prepared by SERUNI, 2019.

² Diskusi Le Citoyen P&C dengan Priscilla Yovia (Koordinator KPO SERUNI Ranting UI) (<https://medium.com/le-citoyen/perempuan-indonesia-melawan-penindasan-e1909cd29f4a>). Diakses pada 30 Agustus 2022.

³ Wawancara peneliti dengan General Secretary SERUNI pada 13 September 2022.

⁴ Diskusi Le Citoyen P&C dengan Priscilla Yovia (Koordinator KPO SERUNI Ranting UI).

⁵ Good News From Indonesia, *Perempuan dengan Seruni* (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/08/01/perempuan-dengan-seruni>). Diakses pada 12 September 2022.

⁶ Good News From Indonesia. Diakses pada 12 September 2022.

⁷ APWLD (<https://apwld.org/about-us/who-we-are/>). Diakses pada 30 Agustus 2022.

⁸ Lathiefah Widuri Retyaningtyas. "Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2018): 85.

(KABAR BUMI) dari Indonesia, *Worker Hub For Change (WH4C)* dari Malaysia, *Center for Trade Union Human Rights (CTUHR)* dari Filipina, dan *Asian Migrants Coordinating Body International Migrants Alliance (AMCB – IMA Hong Kong and Macau)* dari Hong Kong.

APWLD sebagai organisasi internasional berfungsi memayungi organisasi-organisasi lokal di bawahnya dengan menyediakan sumber daya/hibah bagi organisasi lokal untuk menjalankan program APWLD. APWLD membentuk mitra *sub-grant* dalam melaksanakan kampanye atas programnya. Adapun dalam isu hak buruh perempuan, ada dua program APWLD yang sesuai: *Breaking Out of Marginalisation (BOOM)* dan *Labour & Migration (L&M)*. BOOM berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan akar rumput yang terpinggirkan, yang strateginya disusun berdasarkan dokumentasi FPAR. L&M berfokus pada agenda pembangunan kapasitas pengorganisasian dalam isu hak buruh perempuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, sebanyak 39,52% atau 51,79 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah perempuan.⁹ Sebanyak 28,6% bergerak pada penjualan; 24,38% bergerak pada tenaga usaha kebun, tani, ikan, hutan, perburuan, dan ternak; 20,51% bergerak pada tenaga produksi dan pekerja kasar; 10,48% sebagai tenaga profesional dan teknisi; 8,65% bergerak pada bidang usaha jasa; 6,56% sebagai pejabat pelaksana dan tata usaha. Data BPS pada tahun 2017 juga menunjukkan laki-laki masih mendominasi sektor formal, dengan persentase 65,78%. Di tahun 2018, laki-laki juga masih mendominasi dengan persentase 65,62%. Mayoritas perempuan juga bekerja di sektor informal, yang tidak ramah dalam menciptakan pekerjaan yang layak, upah yang rendah, tidak

adanya perlindungan bagi pekerja, dan tidak ada perlindungan hak normatif.¹⁰

PEMBAHASAN

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2017, rata-rata upah buruh laki-laki 2,99 juta, sementara buruh perempuan 2,3 juta. Pada Agustus tahun 2018, rata-rata upah buruh laki-laki adalah 3,06 juta rupiah, sementara buruh perempuan sebesar 2,4 juta rupiah. Kesenjangan upah yang ada menunjukkan bagaimana buruh perempuan kerap mendapat diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi terhadap buruh perempuan juga dapat dilihat dari banyaknya buruh perempuan yang masih mendapatkan status kerja kontrak. Survei Perempuan Mahardhika tahun 2017 di PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung menunjukkan 22,9% buruh garmen perempuan tetap dalam status kontrak setelah bekerja sepuluh tahun.¹¹

Struktur biologis perempuan yang dikesampingkan dan anggapan bahwa perempuan tidak produktif juga menjadi dampak dari budaya patriarki yang berkembang di lingkungan sosial, termasuk lingkungan kerja. Regulasi terkait hak-hak buruh perempuan dapat dilihat dari UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja Perempuan antara pukul 23.00 sampai 07.00, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO. 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Perempuan pada Malam Hari.¹² Selain itu,

⁹ Databoks ([https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/mayoritas-perempuan-indonesia-bekerja-sebagai-tenaga-penjualan#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,sebanyak%2050%2C7%20juta%20orang\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/mayoritas-perempuan-indonesia-bekerja-sebagai-tenaga-penjualan#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,sebanyak%2050%2C7%20juta%20orang).)). Diakses pada 19 September 2022.

¹⁰ BPS, Sakernas 2018 melalui Wage Indicator Data Academy (<https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/permasalahan-pekerja-perempuan-secara-makro-di-indonesia>). Diakses pada 11 September 2022.

¹¹ Perempuan Mahardhika (<https://mahardhika.org/penelitian-kekerasan-berbasis-gender-pada-buruh-garmen-perempuan-2017/>). Diakses pada 11 September 2022.

¹² Sali Susiana (2019). Pelindungan hak pekerja perempuan dalam perspektif

Indonesia juga sudah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam UU No. 7 Tahun 1984. Meski hak buruh perempuan telah dijamin dalam undang-undang, peraturan pelaksana, dan konstitusi, belum semua hak buruh perempuan terpenuhi.

Mengenai hak maternitas sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, namun melalui penelitian pada KBN Cakung yang melibatkan 118 buruh perempuan, 50% dari mereka merasa takut saat hamil, karena lingkungan kerja yang tidak ramah pada buruh hamil, fasilitas yang minimum, keharusan lembur tanpa upah, ketakutan untuk kehilangan pekerjaan, dan rentannya kegagalan dalam kehamilan.¹³ Kesulitan untuk menyusui dan tidak adanya edukasi lebih lanjut mengenai ruang laktasi juga menjadi hal yang dihadapi buruh perempuan. Sosialisasi mengenai cuti haid kerap kali tidak dilakukan, karena haid dianggap sebagai isu yang kurang penting.¹⁴ Isu yang ada berputar dalam diskriminasi upah, ancaman kesehatan reproduksi, dan pelecehan seksual.

Berbagai isu terkait hak buruh perempuan di Indonesia mendorong SERUNI untuk melaksanakan berbagai kampanye dan advokasi untuk memperjuangkan hak buruh perempuan. Dalam melaksanakan program L&M, SERUNI mendorong gerakan perlawanan bagi buruh dan migran perempuan. Program L&M mendorong solidaritas buruh perempuan untuk melaksanakan kampanye dan advokasi untuk bangkit, melawan dan bersatu untuk hak-hak mereka.¹⁵ Dalam menjalankan

program ini, SERUNI membentuk gerakan buruh dan masyarakat sipil untuk menuntut hak-hak buruh perempuan dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Program BOOM mendorong pembangunan kemampuan dan gerakan akar rumput berbasis perspektif feminisme dan bertujuan untuk memperkuat gerakan perempuan pedesaan, penduduk asli, migran, perkotaan dan miskin komunitas tentang hak-hak perempuan, terutama dalam kesetaraan dan reformasi lahan.¹⁶ BOOM diwujudkan melalui penelitian *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) yang memberi ruang bagi jejaring feminis lokal untuk meneliti dan melaporkan isu yang terjadi di masing-masing negara.

Kampanye SERUNI untuk program tahun 2017-2018 dapat dilihat dari riset APWLD *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) dan konsolidasi gerakan perempuan tani dalam reklamasi lahan Pangalengan, serta reklamasi lahan Kandis.

HUBUNGAN SERUNI DENGAN APWLD

Kerja sama SERUNI dan APWLD dapat dilihat pada tahun 2012 saat SERUNI menjadi mitra *sub-grant* APWLD dalam *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) 2012-2014. Pada saat itu, isu yang menjadi fokus SERUNI adalah perampasan lahan oleh perkebunan kelapa sawit dan pelanggaran hak asasi perempuan aktivis oleh polisi dan militer di Olak-Olak, Kalimantan.¹⁷

Pada November 2017, Khasmy, ketua umum SERUNI, menyampaikan kekhawatiran atas penurunan kesehatan anak, masyarakat dan komunitas karena polusi udara yang toksik sebagai perwakilan APWLD dalam *UN Environment Programme: United Nations Environment Assembly* (UNEA3) dan *Grid-Support Grid-Forming* (GSGFM)

feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207.

¹³ Perempuan Mahardhika (<https://mahardhika.org/hasil-riset-maternitas/>). Diakses pada 11 September 2022.

¹⁴ Khamid Istakhori. "Cuti Haid dan Lingkaran Eksploitasi Terhadap Buruh Perempuan di Tempat Kerja: Studi Kasus Pelaksanaan Cuti Haid pada Perusahaan Sektor Garmen dan Tekstil, Kertas, Penambangan Batu Bara, Makanan, dan Jasa di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Riau." *Jentera: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 166.

¹⁵ APWLD (<https://apwld.org/juddho-lawan-confronting-injustices-marching-for-labour-rights/>). Diakses pada 29 Oktober 2022.

¹⁶ APWLD (<https://apwld.org/our-programmes/breaking-out-of-marginalisation/>). Diakses pada 22 November 2022.

¹⁷ APWLD, 2017 *BOOM FPAR Regional Report*: 81.

2017.¹⁸ Dalam pertemuan OHCHR *Feminist 4 a Binding Treaty* di tahun 2018, Khasmy mewakili APWLD dan SERUNI untuk menyampaikan isu *corporate abuse* dan bagaimana perempuan kehilangan hak mereka atas lahan ketika lahan tersebut diolah suatu perusahaan.¹⁹

Di tahun 2020, APWLD dan SERUNI bersama BIEN Filipina bekerja sama dalam membuat laporan dan webinar mengenai isu hak pekerja perempuan. SERUNI juga merupakan mentor FPAR APWLD tahun 2015-2017, dan mitra FPAR dalam program *Climate Justice* APWLD tahun 2021.

ISU HAK BURUH PEREMPUAN DI INDONESIA

Penelitian Lisa Cameron, Diana Contreras Suarez, dan William Rowell menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dan ke-16 di dunia tidak sebanding dengan peningkatan angka partisipasi tenaga kerja wanita di Indonesia.²⁰ Partisipasi perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas dalam jumlah tenaga kerja menyentuh angka 51,4%, dimana tidak tampak perubahan selama dua dekade terakhir karena kesenjangan yang besar antara partisipasi perempuan dan laki-laki sebagai tenaga kerja di Indonesia.²¹ FLFP dianggap menjadi indikator yang penting untuk ditingkatkan, karena akan mempengaruhi kesenjangan gender yang terjadi, mulai dari representasi politik, kepemilikan suara yang lebih besar dalam keputusan rumah tangga, hingga mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga.

Isu agraria juga menjadi isu pokok dalam kampanye dan advokasi organisasi demokrasi nasional di berbagai sektor, termasuk SERUNI. SERUNI aktif dalam membantu menyelesaikan isu perampasan lahan dengan melaksanakan kampanye dan

advokasi mengenai reformasi lahan. Isu reformasi lahan sejati (mencakup tani, buruh, dan perempuan) harus diselesaikan untuk mendukung kemajuan industri. Isu ini menjadi salah satu isu penggerak gerakan perempuan yang difasilitasi oleh SERUNI.

Berdasarkan dialog publik Komnas HAM pada 2021, dalam agenda prioritas pemerintahan Jokowi 2020-2024, terdapat reforma agraria yang bertujuan memberi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pasal 9 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimandatkan bahwa: “Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”²² Namun, data Badan Pertahanan Nasional (BPN) tahun 2018, perempuan hanya memiliki sebesar 15,88% lahan dari 44 juta bidang, dan hanya 24,2% bukti kepemilikan tanah yang atas nama perempuan.²³

Dalam penelitian Rr. Retno Sugiharti dan Akhmad Syakir Kurnia, ditunjukkan bagaimana perspektif kesenjangan upah gender memperlemah pasar tenaga kerja dan menurunkan kualitas hidup perempuan.²⁴ Digunakan model kanonik turunan dalam bentuk fungsi produksi *Constant Elasticity Substitution* (CES), dan hasil penelitian menunjukkan terjadi kesenjangan upah gender di Indonesia. Budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan secara sistematis telah mengesampingkan perempuan dari akses ke sumber daya, kegiatan produktif dan layanan publik. Hal ini mengurangi kemampuan perempuan untuk meningkatkan standar hidupnya, yang berdampak pada ketidakmampuan perempuan

¹⁸ Twitter APWLD (<https://twitter.com/apwld>). Diakses pada 17 November 2022.

¹⁹ Twitter APWLD (<https://twitter.com/apwld>). Diakses pada 17 November 2022.

²⁰ Lisa Cameron, et al. (2020). Female labour force participation in Indonesia: Why has it stalled?. *Achieving Inclusive Growth in the Asia Pacific*, 241.

²¹Loc. cit.

²² Komnas HAM (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1918/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria.html>). Diakses pada 6 Maret 2023.

²³ Ibid.

²⁴ Rr. Retno Sugiharti & A. S. Kurnia (2018). Gender Wage Gap and Education: Case in Indonesia’s Labor Market. In *E3S Web of conferences* (Vol. 73, p. 11019). EDP Sciences, 1.

untuk mengenyam pendidikan tinggi. Terjadi pula penurunan kualitas sumber daya manusia. Kesenjangan upah buruh berbasis gender akhirnya terjadi sebagai hasil dari diskriminasi ini, dimana buruh perempuan mendapat upah yang lebih rendah dengan tingkat produktivitas yang sama dengan buruh laki-laki di Indonesia.

Dalam penelitian Alexander D. Rothenberg dkk, disebutkan bahwa sektor informal dapat memberikan lapangan kerja yang fleksibel bagi perempuan yang menginginkan pekerjaan dekat dengan rumah dan pekerja dengan upah yang murah di tengah krisis ekonomi, dan kehadirannya dikaitkan dengan tata kelola yang buruk.²⁵ Sektor informal yang dianggap lebih fleksibel untuk perempuan yang butuh pekerjaan maupun ingin bekerja di dekat rumah juga tidak ramah dalam menciptakan pekerjaan yang layak, upahnya rendah, tidak memberikan perlindungan bagi pekerja, dan tidak ada perlindungan hak normatif.²⁶

Penelitian Adiatma Y. M. Siregar dkk menyatakan bahwa separuh dari 33,6 juta pekerja perempuan usia subur di Indonesia (15-49 tahun) adalah pekerja informal yang tidak memiliki hak perlindungan maternitas khusus.²⁷ Di Indonesia, klasifikasi ILO menunjukkan bahkan di sektor formal pun pemenuhan hak maternitas belum maksimal. Berdasarkan penelitian Ray Wagiu Basrowi, et al., peningkatan jumlah buruh perempuan selama satu dekade terakhir telah meningkatkan jumlah buruh perempuan yang juga merupakan ibu rumah tangga, yang berdampak pada risiko penghentian

menyusui.²⁸ Adapun faktor penghentian menyusui pada buruh perempuan ibu rumah tangga adalah cuti melahirkan selama tiga bulan dan fasilitas laktasi yang tidak memadai di tempat kerja.

Dalam penelitian Ratna Herawati dkk, dinyatakan bahwa diskriminasi berbasis gender datang dari berbagai pelanggaran HAM dan dapat berupa marginalisasi di bidang ekonomi, subordinasi, anggapan bahwa perempuan itu lemah, stereotip buruk tentang perempuan, kekerasan fisik dan psikologis, dan pembebanan tanggung jawab berat dan terus menerus kepada perempuan.²⁹

Bentuk kekerasan dibagi menjadi kekerasan fisik (41%) dan seksual (31%), dan kekerasan seksual paling banyak dilaporkan kedua, menunjukkan rumah dan hubungan personal pun tidak cukup aman bagi perempuan. Sepanjang 1998-2013, kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari semua kasus kekerasan (93.960 dari 400.939 kasus).³⁰ *Forced-labour* atau kerja paksa juga termasuk ke dalam perbudakan, yang erat terkait dengan kekerasan fisik dan seksual. Akses korban terhadap hukum dan lembaga Komnas HAM masih belum maksimal, terutama untuk kelompok marjinal seperti perempuan miskin dan perempuan di daerah rawan konflik.

KAMPANYE DAN ADVOKASI SERUNI TENTANG HAK BURUH PEREMPUAN DI TAHUN 2017-2018

Kegiatan SERUNI dalam menjalankan program *BOOM* dapat dilihat dari APWLD *Feminist Participatory Action Research* (FPAR). Dalam riset ini, SERUNI mendorong gerakan perempuan tani dalam reklamasi lahan Pangalengan, Jawa Barat. Pada Maret 2017, SERUNI Pangalengan mengadakan konsolidasi Gerakan Perempuan Tani

²⁵ Alexander D. Rothenberg, et al., (2016). Rethinking Indonesia's informal sector. *World Development*, 80, 97.

²⁶ BPS, Sakernas 2018 melalui Wage Indicator Data Academy (<https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/permasalahan-pekerja-perempuan-secara-makro-di-indonesia>). Diakses pada 11 September 2022.

²⁷ Adiatma Y. M. Siregar (2021). The yearly financing need of providing paid maternity leave in the informal sector in Indonesia. *International breastfeeding journal*, 16(1): 1.

²⁸ Ray Wagiu Basrowi, et al., (2018). Challenges and supports of breastfeeding at workplace in Indonesia. *Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition*, 21(4): 248.

²⁹ Ratna Herawati, et al., (2021). The bill elimination on sexual violence: Importance for Indonesian women. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 687.

³⁰ *Loc. cit.*

yang dilaksanakan di kampung Loskulalet, Desa Marga Mekar dalam rangka menyambut May Day 2017. Konsolidasi ini dilaksanakan pada 28 April sampai 1 Mei 2017, dan dihadiri oleh 48 pimpinan ranting berbagai desa di Kecamatan Pangalengan. Diskusi dimulai dengan bahasan mengenai hak perempuan tani Pangalengan atas lahan, masalah kesehatan tani dan buruh perempuan serta anak, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh dan tani perempuan, serta monopoli tanah oleh perusahaan yang menyebabkan krisis ekonomi bagi masyarakat Pangalengan.

Dalam konsolidasi ini, dilakukan penyusunan rencana kerja bersama dengan SERUNI ranting pedesaan di Pangalengan. Hasil dari forum ini adalah kesepakatan atas pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) di seluruh ranting SERUNI untuk mendukung Kongres SERUNI I dan menyambut May Day 2017. Buruh dan tani perempuan Pangalengan juga merencanakan penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang SERUNI Pangalengan. Dilakukan pula pentas budaya dan nyanyian lagu-lagu perjuangan seperti Mars Perempuan, Upah Tanah Kerja, dan Darah Juang.³¹

SERUNI menyediakan wadah bagi buruh dan tani perempuan di YouTube untuk menyuarakan tuntutan mereka melalui video, “Puisi oleh Perempuan Tani Pangalengan.” SERUNI memberi keterangan bahwa puisi ini mengkritik penjajahan imperialisme yang dilayani oleh kapitalis birokrat, yang membuat rakyat Indonesia menderita dan kaum perempuan dianggap rendah dan dinomorduakan.³² Konsolidasi SERUNI dan FPR-C ini bertujuan untuk mendorong perempuan bangkit dan melawan, serta menuntut hak atas reformasi lahan sejati dan pembangunan industri nasional di Indonesia.

Melalui APWLD *Annual Report* 2018, diketahui bahwa SERUNI bersama komunitas

masyarakat sipil Pangalengan berhasil melakukan reklamasi lahan terhadap PT. Agro Jabar. SERUNI menandai keberhasilan ini sebagai bentuk solidaritas persaudaraan dan perjuangan SERUNI dengan gerakan buruh dan tani perempuan yang dibentuknya untuk membawa perubahan struktural.³³ Keberhasilan reklamasi tanah ini membuat APWLD melakukan pelatihan regional FPAR ke-2 dengan menggabungkan kunjungan lapangan ke Pangalengan, Indonesia, di dalamnya. Berdasarkan laporan APWLD, kunjungan ini bertujuan menghasilkan pertukaran ilmu dan membawa kesadaran atas diperlukannya perjuangan feminis yang kolektif dalam menghadapi sistem makroekonomi dan sistem politik yang menindas masyarakat.³⁴

SERUNI juga menjalankan gerakan reklamasi lahan di Kandis, Riau. *Isu corporate abuse di perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Kandis juga sudah disinggung oleh SERUNI pada Commission on the Status of Women 2018 (CSW62): Corporate Abuse and Land Rights.*

Dalam sidang CSW62 yang dilangsungkan di New York pada tahun 2018, Khasmy³⁵ mewakili APWLD untuk menyampaikan isu *corporate abuse* dan hak terkait lahan masyarakat yang hidup di antara perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia, satu perusahaan kelapa sawit bisa menguasai hingga 10 hektar perkebunan monokultur. Khasmy mengkritik dampak dari *corporate abuse* yang terjadi, di antaranya hak lahan yang diberikan ke perusahaan, yang berujung pada hilangnya hak perempuan atas tanah. Lahan yang diklaim perusahaan membuat perempuan di sekitar perkebunan, terutama tani dan buruh, berpotensi kehilangan pekerjaannya.

Tuntutan SERUNI terkait isu ini adalah agar pemerintahan Jokowi-JK menghentikan perampasan dan monopoli tanah, menerapkan reformasi agraria sejati, menghentikan kekerasan pada kaum tani, serta memberikan legalitas lahan bagi masyarakat yang

³¹ Akun resmi SERUNI (<https://facebook.com/seruni.indonesia>). Diakses pada 28 November 2022.

³² Akun YouTube SERUNI (<https://www.youtube.com/watch?v=msa3bKdM1ys>). Diakses pada 28 November 2022.

³³ APWLD. *APWLD We Learn and We Rise Annual Report 2018*. Chiang Mai (2018): 16.

³⁴ *Loc. cit.*

³⁵ Ketua umum SERUNI dan anggota *General Council* APWLD.

sudah menggarap lahan terlantar puluhan tahun.³⁶

Dari pengamatan yang dilaporkan SERUNI ranting daerah, program reformasi agraria ini juga belum mengubah kondisi kerja yang harus dihadapi Buruh Tani Harian-Lepas Perempuan (BHL-Perempuan) di perkebunan yang semakin berisiko. Mereka menghadapi pelecehan dan kekerasan seksual, residu obat-obatan pertanian kimia, serta beban kerja yang tinggi dan setara dengan laki-laki, namun dengan upah yang didiskriminasi.

Hingga saat ini, SERUNI sudah berhasil mereklaim 4 hektar lahan dari puluhan ribu hektar lahan yang dikuasai PT. Ivomas Tunggal.³⁷ Triana Kurnia Wardani, *General Secretary* SERUNI, menyatakan bahwa dengan lahan yang ada, SERUNI menunjukkan bahwa masyarakat lokal kini menggunakan lahan itu untuk pertanian kolektif dan mempersatu masyarakat. Meski begitu, SERUNI menerima respon berupa intimidasi dan ancaman dari perusahaan. Lahan yang dikuasai masyarakat Kandis sudah beberapa kali dibakar, dan masyarakat harus menghadapi preman kiriman perusahaan.³⁸ Wardani juga menambahkan bahwa anggota mayor SERUNI yang telah tergabung dalam ranting Kandis adalah buruh kebun perempuan, sehingga dalam setiap momen gerakan yang ada, SERUNI mengangkat isu buruh perempuan kebun. Isu ini dapat meliputi situasi yang tengah terjadi di Kandis, terutama tentang monopoli lahan.

ANALISIS PENERAPAN STRATEGI TAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SERUNI DAN APWLD

Dalam melaksanakan klasifikasi strategi TAN, SERUNI bergerak aktif dalam strategi *information politics* dan *leverage politics*. Dalam menjalankan strategi *information politics*, NGO

internasional menggerakkan kekuatan jaringan advokasi domestik yang aksesnya sampai ke akar rumput. Hal ini sesuai dengan bagaimana APWLD menggerakkan kekuatan SERUNI dalam mengumpulkan informasi melalui riset dalam program BOOM. Informasi ini diteruskan APWLD untuk dibahas SERUNI dalam forum regional seperti UNEA3, UNEAP, CSW, dan *People's Forum*. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan *Commission on the Status of Women 2018 (CSW62): Corporate Abuse and Land Rights* yang dihadiri SERUNI.

Dalam strategi *leverage politics*, SERUNI menjalankan kemampuan organisasi yang lebih lemah untuk menjalin relasi dengan aktor supranasional yang memiliki kapabilitas dalam mempengaruhi kebijakan, seperti ILO dan UN *Special Procedures of the Human Rights Council*. Dalam strategi ini, NGO internasional menjalankan fungsi dalam membawa isu ke pengawasan internasional melalui *issue linkage*. APWLD juga mengirimkan jaringan advokasi transnasionalnya dalam pertemuan *The Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR). Kesempatan SERUNI untuk berbicara di forum regional ini menjadi dasar dari perluasan jaringan TAN APWLD melalui *issue linkage* untuk mendapat pengawasan internasional terkait isu yang dibahas. Hal ini sesuai dengan fungsi dari strategi *leverage politics* itu sendiri, yaitu untuk memperluas jaringan TAN NGO internasional.

Meski mendapat dukungan APWLD untuk memperkuat basis SERUNI di wilayah baru dan memperluas isu ke level regional, dengan pendanaan yang terbatas, pelaksanaan program-program yang tidak dibiayai donor mengalami kesulitan dalam kampanye dan advokasi secara luas. Dengan keterbatasan dana dan pengaruh yang dimiliki serta posisi sebagai oposisi pemerintah, SERUNI juga memiliki kesulitan dalam merubah regulasi yang ditentang.

Selain itu, untuk melakukan gerakan perlawanan, SERUNI harus bekerja sama dengan buruh perempuan dan masyarakat. Wardani mengaku bahwa hal ini tidak mudah, karena

³⁶ SERUNI (<http://www.seruni.org/2017/09/aksi-piket-seruni-menjelang-htn-hari.html>). Diakses pada 26 November 2022.

³⁷ Wawancara dengan *General Secretary* SERUNI pada 24 Januari 2023.

³⁸ Wawancara dengan *General Secretary* SERUNI pada 24 Januari 2023.

masyarakat, seperti di Kandis, berada dalam kubu yang terpecah. Wardani menambahkan: “Terdapat kubu yang memihak perusahaan, yang akan sulit untuk diajak bekerja sama, dan ada kubu yang dapat diyakinkan untuk melangsungkan perjuangan.” Di sisi lain, buruh perempuan juga memiliki ketakutan untuk melakukan gerakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syamsiah yang mengamati bahwa di tempat kerja, buruh perempuan sering kali merasa takut kehilangan pekerjaan, sehingga gerakan mereka terbatas tanpa dorongan ormas. Dalam menuntut haknya, buruh perempuan tidak hanya berhadapan dengan pemerintah, namun juga perusahaan. Mengutip Syamsiah: “Dalam lingkup perusahaan, buruh berhadapan langsung dengan pengusaha dan nasib buruh berada di tangan pengusaha, sehingga saat menuntut haknya, majikan bisa dengan mudah memecat buruh.” Syamsiah juga menyatakan bahwa buruh perempuan belum mendapat advokasi yang baik mengenai hak-haknya. Dengan keterbatasan yang dimiliki sebagai ormas, SERUNI mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi dan ancaman.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan kegiatan kampanye dan advokasinya, SERUNI menggunakan berbagai strategi, seperti koalisi, *trial* edukasi, aksi massa dan mimbar bebas. Dalam berkoalisi, SERUNI memiliki aliansi strategis SERUNI membentuk aliansi strategis dan taktis. Dalam aliansi strategis, SERUNI dipertemukan secara ideologi dengan berbagai organisasi multisektor dalam satu garis yang sama, yang tergabung dalam Front Pembela Rakyat (FPR).

Aliansi taktis dibentuk berdasarkan isu krusial tertentu. Pendanaan utama SERUNI berasal dari iuran anggota sesuai dengan wilayah masing-masing. Donor SERUNI terbagi menjadi *coordinator funding* yang membiayai semua program SERUNI, dan donor *project* yang membiayai riset, berjejaring dan memperluas aksi kampanye. APWLD merupakan mitra donor *project* SERUNI.

Permasalahan yang dihadapi SERUNI adalah pendanaan yang terbatas karena tidak seluruh kegiatan dibiayai oleh APWLD, hubungan antagonistik yang dimiliki SERUNI dengan pemerintah dan perusahaan, serta pembangunan aliansi dengan buruh perempuan dan masyarakat itu sendiri yang terkadang mengalami hambatan. SERUNI juga kerap mendapat intimidasi dan ancaman dari perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Basrowi, R. W., et al.. (2018). Challenges and supports of breastfeeding at workplace in Indonesia. *Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition*, 21(4), 248-256.
- Cameron, L., Suarez, D. C., & Rowell, W. (2020). Female labour force participation in Indonesia: Why has it stalled?. *Achieving Inclusive Growth in the Asia Pacific*, 241.
- Herawati, R., Purwanti, A., & Pinilih, S. A. G. (2021). The bill elimination on sexual violence: Importance for Indonesian women. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 687-694.
- Istakhori, K. Cuti Haid dan Lingkaran Eksploitasi Terhadap Buruh Perempuan di Tempat Kerja: Studi Kasus Pelaksanaan Cuti Haid pada Perusahaan Sektor Garmen dan Tekstil, Kertas, Penambangan Batu Bara, Makanan, dan Jasa di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. *Jentera: Jurnal Hukum*, 1(2), (2017): 158-174.
- Retyaningtyas, L. W. Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan. *Jurnal Hubungan Internasional* 11.1, (2018): 73-90.
- Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., ... & Weiland, S. (2016). Rethinking Indonesia's informal sector. *World Development*, 80, 96-113.

- Siregar, A. Y., et al.. (2021). The yearly financing need of providing paid maternity leave in the informal sector in Indonesia. *International breastfeeding journal*, 16(1), 1-10.
- Sugiharti, R. R., & Kurnia, A. S. (2018). Gender Wage Gap and Education: Case in Indonesia's Labor Market. In *E3S Web of conferences* (Vol. 73, p. 11019). EDP Sciences.
- Susiana, S. (2019). Pelindungan hak pekerja perempuan dalam perspektif feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207-221.
- LAPORAN RESMI**
- APWLD, 2017 *BOOM FPAR Regional Report* (2017).
- APWLD. 2019 *FDJ Brief Indonesia – Prepared by SERUNI* (2022).
- APWLD. *APWLD We Learn and We Rise Annual Report 2018* (2018).
- ARTIKEL DALAM WEBSITE**
- APWLD. Global Campaign for Decent Work and Living Wage. Diakses pada 26 Januari 2022. (<http://apwld.org/global-action-for-cambodian-workers/>).
- APWLD. Juddho! Lawan! Confronting Injustices, Marching for Labour Rights. Diakses pada 29 Oktober 2022. (<https://apwld.org/juddho-lawan-confronting-injustices-marching-for-labour-rights/>).
- APWLD. Women workers unite to fight for rights, sing hymn of solidarity. Diakses pada 17 November 2022. (<https://apwld.org/press-release-solidarityforever/>).
- APWLD. BOOM. Diakses pada 22 November 2022. (<https://apwld.org/our-programmes/breaking-out-of-marginalisation/>).
- Databoks. Mayoritas Perempuan Indonesia Bekerja sebagai Tenaga Penjualan. Diakses pada 19 September 2022. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/mayoritas-perempuan-indonesia-bekerja-sebagai-tenaga-penjualan>).
- Good News From Indonesia. Perempuan dengan Seruni. Diakses pada 12 September 2022. (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/08/01/perempuan-dengan-seruni>).
- GSBI. Diakses pada 29 Januari 2022. (<https://www.infogsbi.or.id/2017/02/laporan-lengkap-rekomendasi-ilo-untuk.html?m=1>).
- Kedai Pena. Lawan dan Bubarkan IMF-WB Bila Tiada Koreksi. Diakses pada 24 November 2022. (<https://www.kedaipena.com/lawan-dan-bubarkan-imf-wb-bila-tiada-koreksi/>).
- Komnas HAM. Hak Perempuan dalam Reforma Agraria. Diakses pada 6 Maret 2023. (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1918/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria.html>).
- Le Citoyen P&C. Perempuan Indonesia Melawan Penindasan. Diakses pada 30 Agustus 2022. (<https://medium.com/le-citoyen/perempuan-indonesia-melawan-penindasan-e1909cd29f4a>).
- Perempuan Mahardhika. Penelitian Kekerasan Berbasis Gender pada Buruh Garmen Perempuan. Diakses pada 11 September 2022. (<https://mahardhika.org/penelitian-kekerasan-berbasis-gender-pada-buruh-garmen-perempuan-2017/>).
- Perempuan Mahardhika. **Tempat Kerja (Pabrik) Belum Menjadi Ruang Aman Bagi Buruh Hamil.** Diakses pada 11 September 2022. (<https://mahardhika.org/hasil-riset-maternitas/>).
- SERUNI. Aksi piket SERUNI menjelang HTN (Hari Tani Nasional) 2017. Diakses pada 26 November 2022. (<http://www.seruni.org/2017/09/aksi-piket-seruni-menjelang-htn-hari.html>).

Wage Indicator Data Academy.
Diakses pada 11 September
2022. ([https://wageindicator-
data-
academy.org/countries/data-
akademi-garmen-indonesia-
bahasa/sensitivitas-
gender/permasalahan-pekerja-
perempuan-secara-makro-di-
indonesia](https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/permasalahan-pekerja-perempuan-secara-makro-di-indonesia)).